KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN ZAKAT BAGI WARGA YANG TERDAMPAK STUNTING DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Fitri Wahyuni¹, Yaswirman², Nilma Suryani²

¹Universitas Islam Indragiri

²Universitas Andalas

Email: fw160586@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The causes of the still high stunting rate in Indonesia are very complex. This includes the Indragiri Hilir Regency. The number of cases of stunting that is the cause is more to do with economic problems and poor families. based on data from the Health Service (Diskes) the stunting rate in Inhil still reaches 3.15 percent. Therefore, appropriate steps are needed to reduce and prevent stunting, one of which is by distributing zakat to families affected by stunting. However, this needs to be studied according to Islamic law, are those affected by stunting the party (group) entitled to receive zakat? This research is normative legal research. With secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with qualitative data analysis by drawing deductive conclusions. The results of the study show that in Islamic law there are eight asbab (classes) who are entitled to receive zakat, namely 1. Fakir 2. Poor 3. 'Amilin (zakat manager) 4. Muallaf. 5). Riqab (slave), 6). Gharimin (People who are in debt), 7). Sabilillah (people who fight in the way of Allah), 8). Ibn Sabil. Of the eight groups referred to by residents in Indragiri Hilir who are affected by stunting, they are included in the poor category, so according to Islamic law, they are entitled to receive zakat.

Keywords: Islamic Law, Zakat, Stunting

Abstrak

Penyebab masih tingginya angka stunting di Indonesia sangat kompleks. Termasuk juga di Kabupaten Indragiri Hilir Banyaknya kasus-kasus terjadinya stunting yang menjadi penyebabnya lebih kepada persoalan ekonomi dan keluarga yang tidak mampu. berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) angka stunting di Inhil masih mencapai angka 3,15 persen. Oleh karena itu perlu langkah-langkah yang tepat guna menurunkan dan mencegah terjadinya stunting salah satunya dengan penyaluran zakat kepada keluarga yang etrdampak stunting. Namun hal tersebut perlu dikaji menurut hukum Islam apakah mereka yang terdampak stunting merupakan pihak (golongan) yang berhak menerima zakat?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dengan data-data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dengan analisa datanya berupa kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian bahwa dalam hukum Islam ada delapan asbab (golongan) yang berhak menerima zakat yaitu 1.Fakir 2. Miskin 3. 'Amilin (Pengelola zakat) 4. Muallaf. 5). Riqab (budak), 6). Gharimin (Orang yang dililit hutang), 7). Sabilillah (orang yang berperang di jalan Allah), 8). Ibnu Sabil. Dari delapan golongan yang dimaksud warga yang ada di Indragiri Hilir yang terdampak stunting merupakan mereka yang termasuk dalam kategori miskin, maka menurut hukum Islam mereka berhak menerima zakat.

Kata kunci Hukum Islam, Zakat, Stunting

1. PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas merupakan syarat untuk membawa Indonesia maju. Namun, penyiapan SDM unggul masih menghadapi tantangan bernama stunting. Stunting dapat didefinisikan sebagai kondisi tinggi

badan seseorang yang kurang dari normal berdasarkan usia dan jenis kelamin. Tinggi badan merupakan salah satu jenis pemeriksaan antropometri dan menunjukkan status gizi seseorang. Adanya stunting menunjukkan status gizi yang kurang (malnutrisi) dalam jangka waktu

yang lama (kronis).¹

Persoalan stunting merupakan persoalan yang terjadi di Indonesia dimana angka stunting di Indonesia mencapai 30,8 %. Hal ini didasarkan pada data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan prevalensi balita stunting di tahun 2018 mencapai 30,8 persen di mana artinya satu dari tiga balita mengalami stunting. Indonesia sendiri, bahkan merupakan negara dengan beban anak stunting tertinggi ke-2 di Kawasan Asia Tenggara dan ke-5 di dunia.²

Sedangkan data stunting di Provinsi Riau tercatat sebesar 23,3%. Terdapat 6 kabupaten/kota di Riau yang memiliki prevalensi di atas rata-rata provinsi tersebut. Prevalensi tertinggi ditemukan di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu 29,7%, diikuti Kabupaten Indragiri Hilir 28,4%, Kabupaten Rokan Hulu 25,8%, Kabupaten Kampar 25,7%, Kabupaten Indragiri Hulu 23,6%, dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 23,3%. Terdapat pula 6 kabupaten/kota dengan prevalensi balita *stunting* di bawah angka rata-rata provinsi, yaitu Kota Pekanbaru 11,4%, Kabupaten Siak 19%, Kabupaten Pelalawan 21,2%, Kabupaten Bengkalis 21,9%, Kabupaten Kuantan Singingi 23%, serta Kota Dumai 23%.³ Artinya diantara kabupaten yang ada di Provinsi Riau kabupaten Indragiri Hilir termasuk kabupaten yang memiliki Prevalensi yang cukup tinggi angka stuntingnya diantara kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

Persoalan stunting tidak hanya dialami keluarga miskin, namun juga mereka yang berstatus keluarga mampu atau berada. Stunting, tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik, namun juga terganggunya perkembangan otak. Penyebab masih tingginya angka stunting di Indonesia sangat kompleks. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi pada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan asupan gizi dan kebersihan diri pada ibu hamil dan anak dibawah usia dua tahun. Selain itu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi

seimbang serta pemberian ASI yang kurang tepat.

Banyaknya kasus-kasus terjadinya stunting di kabupaten Indragiri hilir lebih kepada persoalan ekonomi dan keluarga yang tidak mampu. berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) angka stunting di Inhil masih mencapai angka 3,15 persen.⁴ Dengan banyaknya kasus-kasus stunting yang terjadi perlu adanya upaya-upaya bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Indragiri Hilir dalam menurunkan dan mencegah adanya kasus-kasus stunting melalui pemberdayaan zakat yang ada baik yang dihimpun oleh lembaga resmi pemerintah maupun lembaga yang dihimpun secara swadaya oleh masyarakat. Karena sejatinya zakat dalam hukum islam diperuntukkan untuk mereka yang secara ekonomi sangat lemah dan apakah mereka yang terdampak stunting tersebut dapat menerima dan berhak untuk menerima penyaluran zakat dari lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah dan oleh lembaga zakat yang dikelola secara swadaya masyarakat? Hal ini perlu dikaji menurut kajian hukum Islam.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Zakat dalam Pandangan Maqashid Syariah

Maqasid al syari'ah secara etimologi berarti maksud dan tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Pengertian maqasid al syari'ah secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah memahami makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh syari' pada hukum-hukumnya dan keutamaannya. Atau tujuan-tujuan syari'at serta rahasia-rahasia hukum yang telah ditetapkan oleh Allah (syari') pada setiap hukumnya. Teori maqasid al syari'ah yang dikemukakan oleh Abi Ishaq al Syatibi, yang mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan manusia di dunia dan diakhirat. Tujuan utama syari'at ialah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yang disebut sebagai daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.⁵

Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta

¹Aryu Candra, *Epidemiologi Stunting*, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, 2020, hlm. 7

²<https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/828> diakses tgl 16 Feb 2023

³<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/20/ini-wilayah-dengan-prevalensi-balita-stunting-terbesar-di-riau-pada-2021>. diakses tgl 16 Feb 2023

⁴<https://www.goriau.com/berita/baca/kasus-stunting-di-inhil-capai-315-persen.html>. diakses tgl 16 Feb 2023.

⁵Fitri Wahyuni, *Formulasi Sanksi Pidana Perkosaan Pada Anak Dalam Persektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia kaitannya dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017, hal. 44.

kebahagiaan manusia sebagai individu dan kepentingan masyarakat seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Maka kebutuhan dharuriyyat merupakan kebutuhan yang harus ada dan apabila tidak terpenuhi maka terancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka untuk memelihara kelima pokok tersebut, maka syariat di turunkan. Karena tanpa terpeliharanya kelima kepentingan pokok tersebut, maka tidak tercapainya kehidupan manusia yang sempurna. Kepentingan kelima pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶

1. Memelihara Agama (*hifzh al-Din*)
2. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)
3. Memelihara Akal (*Hifzh al-Aql*).
4. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nas*)
5. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Dalam permasalahan ekonomi, para ulama sejak masa Imam Al-Ghazali (505 M) telah bersepakat bahwa menjaga harta (*hifdz al-maal*) adalah salah satu dari al-maqashid asy-syariah yang pokok atau termasuk ke dalam 5 (lima) kebutuhan dasar manusia yang lima (*dharuriyat alkhamis*). Islam meletakkan pengelolaan dan penjagaan harta sebagai sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Sehingga tak heran, banyak para ulama yang menulis bab atau buku yang secara khusus membahas al-maqashid asy-syariah dalam ekonomi, diantaranya adalah Imam Muhammad Thahir Ibnu Asyur dalam bukunya "Al-Maqashid Asy Syari'ah Al-Islamiyah" dan Yusuf al Qaradhawi dalam bukunya "Al-Maqashid Asy-Syariah Al-Muta'alliqah bil Maal". Dengan demikian, maka aplikasi syariah yang terkait dengan ekonomi tidak boleh melupakan ruh dan semangat pensyariatannya, al-maqashid asy-syariah.⁷

Maqashid Syariah merupakan sebuah tujuan dari implementasi syariat (hukum Islam) dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Konsep ini menjadi sebuah konsepsi berfikir yang melekat pada pembangunan teori dan praktik ekonomi dan keuangan Islam. Sebuah konsep yang sangat komprehensif dalam mengatur bagaimana seharusnya ekonomi Islam dibangun baik dalam tataran mikro maupun makro.

Maqashid Syariah dibangun di atas sebuah asumsi dasar bahwa syariat yang telah Allah Sang Pembuat Syariat tetapkan melalui sumber-sumber utama ontologi Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, dibangun di atas tujuan pencapaian

kemaslahatan, bukan hanya bagi individual melainkan juga sosial. Maka dari itu, sumber-sumber turunan di bawah sumber utama otologi Islam tersebut juga harus merujuk pada pencapaian maqashid syariah individu dan masyarakat secara luas, bukan hanya menggunakan pendekatan fiqh klasik.

Terkait dengan itu, argumen Ebrahim et al bahwa pembangunan ekonomi dan sosial dewasa ini perlu mengikuti ijtihad yang dinamis berlandaskan pada maqashid syariah, bukan hanya sekadar fiqh klasik, adalah sangat relevan. Selain dapat sesuai dengan tujuan syariah, hal ini juga mendorong terciptanya iklim pembangunan yang inovatif dan dinamis. Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut definisi dan kerangka kerja yang pasti dan jelas terkait dengan maqashid syariah perlu dibangun.⁹ Untuk memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang dimiliki oleh ekonomi Islam, maqashid syariah telah sepatutnya digunakan sebagai basis pertimbangannya, setidaknya inspirasi dari perspektif maqashid syariah tersebut.

2.2 Mustahiq Zakat (golongan yang berhak menerima zakat)

Para ulama mazhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan. Dan semuanya sudah disebutkan dalam surat Al-Taubah ayat 60,¹⁰ Artinya: "sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang mempunyai hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan. (AT-Taubah ayat 60).

Dikalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat mengenai kriteria masing-masing golongan penerima zakat tersebut, Islam sudah mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Golongan ini dikenal dengan istilah *ashnab* delapan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amilin, riqab, gharimin, sabilillah dan *ibnu sabil*. perinciannya adalah sebagai berikut:¹¹

a. Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya. Pengarang al-

⁶ *Ibid.*

⁷ Hani Fauziah dkk, *Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, Kasaba: Journal Of Islamic Economy, Vol 11 No Tahun 2018, hal.103.

⁸ Tim Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), *Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*, 2017, hal.10.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,.... hal.196.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, hal.62

Muhazzab menulis definisi faqir sebagai berikut: "Fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu (usaha/alat/media) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya". Dari definisi ini dapat dilihat bahwa fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Tidak punya usaha dan tidak memiliki penghasilan tetap, serta tidak punya alat dan kemampuan untuk bekerja. Jika dianggakan mungkin yang didapat hanya dua atau tiga sementara kebutuhannya sepuluh.

b. Miskin

secara umum Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan. Dari definisi ini diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primernya.

Persamaan keduanya adalah bahwa keduanya adalah kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Sementara itu, perbedaan antara keduanya adalah bahwa orang yang tergolong fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan dan tidak mempunyai kemampuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan dan kemampuan bekerja, tetapi penghasilan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.

Ada juga ulama yang mengatakan bahwa fakir lebih parah keadaan ekonominya dibanding miskin, tetapi ada pula diantara ulama yang berpendapat sebaliknya, miskin lebih terpuruk ekonominya dibandingkan dengan faqir. Terlepas dari siapa yang lebih buruk dalam keadaan ekonominya di antara fakir dan miskin, yang jelas mereka, baik faqir maupun miskin, adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau hajat hidupnya. Batas pemisah antara status fakir dan miskin dengan kaya adalah kepemilikan terhadap nishab hartanya.

c. Amil

Secara bahasa amil berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan). Dalam istilah fiqih, amil didefinisikan "orang yang diangkat oleh pemerintah (Imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat kepada orang yang berhak menerimanya". Di Indonesia, kata ini amil juga dipakai untuk sebutan bagi orang-orang yang diamanahkan atau ditunjuk untuk mengurus zakat, terkhusus zakat fitrah. Sayangnya, kata amil/ belum begitu familier para struktur BAZNAS ataupun LAZ, mereka biasanya masih disebut dengan pengurus.

Ada hal menarik yang patut diketahui bahwa, amil tidak hanya ditunjuk berdasarkan karena ia rajin ke masjid, atau karena rumahnya dekat masjid, atau karena ia pengangguran dan yang semakna dengannya. Akan tetapi Islam juga mengatur beberapa ketentuan yang setidaknya dimiliki oleh seorang amil. Setidaknya ada em pat

hal yakni. al-su'ah (pengumpul), al-katabah (administrator), al-hazanah (penjaga/pemelihara/pengembang), dan ai-Qasamah (distributor). Kepada para anggota amil zakat yang tidak mendapat gaji khusus dari pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaannya mengelola zakat, sekalipun mereka tergolong orang yang kaya diberikan hak untuk mendapat dan menerima dana zakat sebagai penghargaan kepada mereka atas amal bakti mereka yang mereka sumbangkan. Adapun besarnya, disesuaikan dengan keadaan.

Agar dapat ditunjuk sebagai amil zakat yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik, hendaklah yang bersangkutan memenuhi syarat utama dan syarat pendukung. Syarat utama dimaksud adalah (1) bukan termasuk keluarga Rasullullah Saw dan atau Bani Hasyim atau Bani Abdul Muthallib, (2) Islam, (3) Adil, (4) Amanah, (5) Memiliki waktu yang cukup. Sementara itu, syarat pendukung untuk menjadi Amil Zakat adalah memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi. Syarat ini diadakan dengan tujuan agar kesulitan ekonomi yang dialami tidak mengganggu kelancaran tugasnya dan tidak akan menimbulkan buruk sangka orang kepada yang bersangkutan.

d. Muallaf

Secara harfiah kata mual/af berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut istilah fiqih zakat "muallaf" adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk Agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.

e. Riqab

Yang dimaksud dengan riqab dalam istilah fiqih zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya. Istilah lain yang digunakan oleh ulama fiqih untuk menyebut riqab adalah mukatab, yaitu hamba yang oleh tuannya "dijanjikan akan dimerdekakan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang/harta.

Zakat diberikan kepada roqab dalam rangka membantu mereka membayar uang yang dijanjikan tuannya. Namun demikian, yang bersangkutan tidak boleh menerima zakat dari tuannya (tuannya tidak boleh berzakat kepada riqabnya) karena akan terjadi perputaran harta secara semula, yaitu dari tuan ke tuan. Imam AI Bajuri menyebutkan: "Adapun Tuan yang memiliki hamba mukatab (riqob) tidak boleh memberikan zakatnya kepada hamba mukatabnya tersebut, karena kemanfaatan pemberian tersebut akan kembali lagi".

Pada zaman sekarang, golongan riqab sudah sangat sulit ditemukan atau mungkin tidak lagi, dan ini tidak bisa dikembangkan. Adapun

pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa riqob dapat diqiyaskan dengan membebaskan para wanita tuna susila (pelacur) dari cengkraman mucikari adalah pendapat yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan qiyasnya yang tidak memenuhi syarat. Orang-orang semacam ini sebaiknya tidak dimasukan kedalam kelompok riqob, tetapi dimasukan ke dalam kategori fi sabillilah.

f. Gharimin

Yang termasuk kategori Ghorim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan, apabila orang yang berhutang tersebut mampu membayarnya, maka beban Fi Sabillilah

Secara harfiyah fi sabillilah berarti "pada jalan menuju (ridha) Allah". Dari pengertian harfiyah ini, terlihat cakupan fi sabillilah begitu luas, karena menyangkut semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah Swt. Jumhur ulama memberikan pengertian fi sabillilah sebagai "perang mempertahankan dan mempejuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin" Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapat gaji dari negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, ada di antara mufassirin yang berpendapat bahwa fi sabillil/ah itu mencakup juga kepentingan -kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, pos yandu, perpustakaan dan lain-lain.

g. Ibnu Sabil

Secara bahasa ibnu sabil terdiri dari dua kata : ibnu yang berarti "anak" dan sabil yang berarti jalan. Jadi Ibnu sabil adalah anak jalan, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain adalah musafir. Yang dimaksud dengan perjalanan di sini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama Allah SWT. Misalnya perjalanan menuju lembaga pendidikan pesantren, perjalanan zirah ke makam para wali, perjalanan ingin bersilatullah dengan keluarga, terutama orang tua yang tempatnya begitu jauh dan yang semakna dengannya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1 Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian data yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana baiknya

peristiwa itu menurut hukum.¹²Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat¹³.

3.2 Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber-sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder diperoleh dari 3 (tiga) bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun Tersier.

1. Bahan Hukum Primer berupa Undang-Undang yang terakait dengan penelitian ini terutama tentang Zakat.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan yang di teliti.
3. Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. hukum sebagai keseluruhan peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah.

3.3 Analisis data

Analisa data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat menggunakan induktif atau deduktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN ZAKAT BAGI WARGA YANG TERDAMPAK STUNTING DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Para pakar ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 153.

¹³Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua* PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1998, hlm. 36.

dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-quran, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.¹⁴

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.¹⁵

Kewajiban zakat telah diperintahkan Allah, sebagai bentuk pendistribusian kekayaan kepada pihak yang lebih memerlukan sebagai ibadah sosial zakat telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi.¹⁶ Kewajiban zakat sepadan dengan kewajiban shalat yaitu wajib 'aini dalam arti kewajiban berzakat tidak mungkin dibebankan kepada orang lain.

Para Imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, baligh dan berakal sehat. Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu ai-Qur'an dan ai-Hadits. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat ai-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. Ini menunjukkan keinginan Allah Swt agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah Swt hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berfikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Secara jelas Allah mengatur secara jelas kepada siapa zakat itu didistribusikan. Allah sendirilah yang telah menetapkan delapan (8) golongan yang berhak mendapatkan zakat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Taubah ayat: 60 yang Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk

(membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Ayat diatas secara jelas menyatakan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat: 1). Fuqara' (Orang-orang fakir), yaitu kelompok orang yang sangat menderita dalam hidupnya, ia tidak memiliki harta dan kemampuan untuk memenuhi hajat hidupnya. 2). Masakin (Orang-orang miskin) adalah orang yang tidak mampu kehidupannya dan serta kekurangannya. Ia mempunyai pekerjaan, namun tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 3). 'Amilin (Pengelola zakat) merupakan orang yang di mandati tugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. 4). Muallaf yaitu orang non Islam yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5). Riqab (budak), yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir (tawanan perang). 6). Gharimin (Orang yang dililit hutang), yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Sementara bagi orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7). Sabilillah (orang yang berperang di jalan Allah), ialah orang yang mempunyai keperluan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Terdapat beberapa penafsiran, bahwa sabilillah pada masa sekarang orang-orang yang berjuang untuk kepentingan penyebaran agama Allah seperti para ulama dan kyai, ta'mir masjid dan lain sebagainya. 8). Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang menempuh perjalanan yang bukan untuk ma'siat, dan ia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dari delapan golongan penerima zakat yang di jelaskan diatas, masyarakat di Indragiri Hilir yang terdampak stunting merupakan keluarga yang tergolong miskin. Artinya menurut hukum Islam bahwa orang yang miskin merupakan golongan yang harus diberikan haknya untuk memperoleh zakat. Demikian pula Kunci untuk menurunkan angka stunting adalah penangan kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu penyebab ibu dan anak tidak memperoleh gizi yang cukup. Salah satu cara untuk menangani kemiskinan adalah melalui kegiatan pemberian zakat produktif. Oleh karena itu, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat.

¹⁴Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi. Ke-, hal.7

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2003), Cet. 1, hal. 80-81.

Menurut Al-Qardhawi¹⁷ bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Lebih dari itu, menurut al-Qardhawi, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Banyaknya kasus-kasus terjadinya stunting di kabupaten Indragiri hilir lebih kepada persoalan ekonomi dan keluarga yang tidak mampu. Upaya-upaya dalam memberantas dan mencegah terjadinya kasus-kasus stunting harus diupayakan melalui peningkatan ekonomi salah satunya dengan menyalurkan zakat bagi keluarga yang terdampak stunting sehingga dengan peningkatan ekonomi keluarga kesadaran terhadap pola hidup sehat dan gizi yang seimbang akan mencegah terjadinya stunting kembali. Dalam hukum Islam mereka yang terdampak stunting yang memiliki ekonomi lemah (miskin) merupakan golongan yang termasuk ke dalam asnab (pihak-pihak yang berhak menerima zakat) terutama keluarga yang terdampak stunting yang merupakan ekonomi lemah atau miskin. Jadi jelas penyaluran zakat bagi warga yang terdampak stunting dapat menerima dan sangat berhak menerima zakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada kampus tercinta Universitas Islam Indargiri yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Semoga kontribusi yang diberikan kepada peneliti menjadi amal jariyah di akhirat kelak amin.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Aryu Candra, *Epidemiologi Stunting*, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, 2020.
- [2]. Al-Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*,

terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.

- [3]. Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua* PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1998.
- [4]. Fitri Wahyuni, *Formulasi Sanksi Pidana Perkosaan Pada Anak Dalam Persektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia kaitannya dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017.
- [5]. Hani Fauziah dkk, *Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, Kasaba: Journal Of Islamic Economy, Vol 11 No Tahun 2018.
- [6]. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- [7]. Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- [8]. Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2003).
- [9]. Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- [10]. Tim Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), *Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*, 2017.
- [11]. Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*.
- [12]. <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/828> diakses tgl 16 Feb 2023
- [13]. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/20/ini-wilayah-dengan-prevalensi-balita-stunting-terbesar-di-riau-pada-2021>. diakses tgl 16 Feb 2023
- [14]. <https://www.goriau.com/berita/baca/kasus-stunting-di-inhil-capai-315-persen.html>. diakses tgl 16 Feb 2023.

¹⁷Al-Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.